

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2020**

Balai Besar Karantina Pertanian Makassar

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020



Jalan Perintis Kemerdekaan Km.12 Makassar
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.12 Makassar
<http://makassar.karantina.pertanian.go.id/>

KATA PENGANTAR

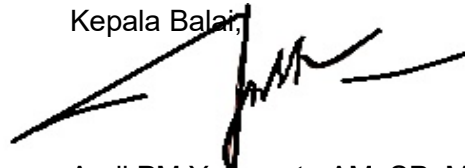
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Karantina Pertanian Makassar adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Karantina Pertanian Makassar. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Makassar, 31 Desember 2020
Kepala Balai,



Andi PM Yusmanto AM, SP, MP
NIP. 197009222000031001

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
Pernyataan Telah Direviu	4
Pernyataan Tanggung Jawab.....	5
Ringkasan.....	6
I Laporan Realisasi Anggaran.....	8
II Neraca.....	9
III Laporan Operasional.....	10
IV Laporan Perubahan Ekuitas.....	11
V Catatan atas Laporan Keuangan.....	12
A Penjelasan Umum.....	12
B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	20
B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	21
B.2 Belanja Pegawai.....	22
B.3 Belanja Barang.....	22
B.4 Belanja Modal.....	23
B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	24
C Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	25
C.1 Aset Lancar.....	25
C.1.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran.....	25
C.1.2 Persediaan.....	25
C.2 Aset Tetap.....	26
C.2.1 Tanah.....	26
C.2.2 Peralatan dan Mesin.....	27
C.2.3 Gedung dan Bangunan.....	30
C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	30
C.2.5 Aset Tetap Lainnya.....	31
C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	31
C.3 Aset Lainnya.....	32
C.3.1 Aset Tak Berwujud.....	32
C.3.2 Aset Lain-lain.....	32
C.3.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.....	34
C.4 Kewajiban Jangka Pendek.....	35
C.4.1 Uang Muka dari KPPN.....	35
C.5 Ekuitas.....	35
C.5.1 Ekuitas.....	35
D Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	36
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.....	36
D.2 Beban Pegawai.....	36
D.3 Beban Persediaan.....	37
D.4 Beban Barang dan Jasa.....	38
D.5 Beban Pemeliharaan.....	38
D.6 Beban Perjalanan Dinas.....	39
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	40
D.8 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.....	40

E	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	42
E.1	Ekuitas Awal.....	42
E.2	Surplus/Defisit-LO.....	42
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar.....	42
E.4	Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas.....	42
E.4.1	Koreksi Lain-lain.....	42
E.4.2	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	42
E.4.3	Penyesuaian Nilai Aset.....	43
E.4.4	Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	43
E.5	Transaksi Antar Entitas.....	43
E.5.1	Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL).....	44
E.5.2	Transfer Masuk/Transfer Keluar.....	44
E.6	Ekuitas Akhir.....	44
F	Pengungkapan-pengungkapan Lainnya.....	45
F.1	Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca.....	45
F.2	Pengungkapan Lain-lain.....	45



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN MAKASSAR**

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 12, MAKASSAR 90241 TELEPON : (0411) 581323 FAKSIMILI : (0411) 581326
JALAN KAPASA RAYA NO. 17 KM. 14 DAYA, MAKASSAR 90241 TELEPON : (0411) 518351 FAKSIMILI : (0411) 510041
WEBSITE : <http://bbkp-makassar.karantina.deptan.go.id>
EMAIL : bbkp.makassar@gmail.com; bkt-makassar@deptan.go.id; bkh-makassar@deptan.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Makassar, 31 Desember 2020
Kepala Balai,

Andi PM Yusmanto AM, SP, MP
NIP. 197009222000031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp4.551.725.167,00 atau mencapai 120,05% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp3.791.403.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp26.948.362.897,00 atau mencapai 95,84% dari alokasi anggaran sebesar Rp28.117.195.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp146.733.004.049,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.124.480.458,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp145.540.778.591,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp67.745.000,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp81.661.328,00 dan Rp146.651.342.721,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.327.491.772,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp28.416.942.337,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-24.089.450.565,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp235.035.057,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-23.854.415.508,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp127.781.831.286,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-23.854.415.508,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp20.225.008.213,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp22.498.918.730,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp146.651.342.721,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN MAKASSAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020			31 Desember 2019
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	3.791.403.000,00	4.551.725.167,00	120,05	4.500.135.338,00
Jumlah Pendapatan		3.791.403.000,00	4.551.725.167,00	120,05	4.500.135.338,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	12.507.758.000,00	12.057.601.192,00	96,40	12.441.964.543,00
Belanja Barang	B.4.	11.952.537.000,00	11.277.517.055,00	94,35	9.546.175.973,00
Belanja Modal	B.5.	3.656.900.000,00	3.613.244.650,00	98,81	771.689.450,00
Jumlah Belanja		28.117.195.000,00	26.948.362.897,00	95,84	22.759.829.966,00

II. NERACA

BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN MAKASSAR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
Aset Lancar			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.1.	4.913.686,00	4.793.999,00
Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	0,00	5.002,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.3.	0,00	-25,00
Persediaan	C.1.4.	1.119.566.772,00	699.151.402,00
Jumlah Aset Lancar		1.124.480.458,00	703.950.378,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	85.670.372.000,00	85.670.372.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	35.440.393.776,00	32.301.880.876,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	59.271.476.933,00	36.103.146.933,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	6.610.713.951,00	7.010.186.951,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.5.	180.175.750,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-41.632.353.819,00	-34.019.153.791,00
Jumlah Aset Tetap		145.540.778.591,00	127.066.432.969,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	53.000.000,00	53.000.000,00
Aset Lain-lain	C.3.2.	791.519.841,00	1.446.349.841,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3.	-776.774.841,00	-1.431.604.841,00
Jumlah Aset Lainnya		67.745.000,00	67.745.000,00
Jumlah Aset		146.733.004.049,00	127.838.128.347,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	81.661.328,00	56.297.061,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		81.661.328,00	56.297.061,00
Jumlah Kewajiban		81.661.328,00	56.297.061,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	146.651.342.721,00	127.781.831.286,00
Jumlah Ekuitas		146.651.342.721,00	127.781.831.286,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		146.733.004.049,00	127.838.128.347,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN MAKASSAR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	4.327.491.772,00	4.497.680.456,00
JUMLAH PENDAPATAN		4.327.491.772,00	4.497.680.456,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	12.097.824.192,00	12.441.964.543,00
Beban Persediaan	D.3.	662.027.474,00	764.050.631,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	6.219.241.394,00	4.817.237.885,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	2.140.739.060,00	1.861.887.704,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1.903.778.188,00	2.158.592.489,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	-4.913.687,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	5.398.245.741,00	3.843.528.686,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9.	-25,00	-43,00
JUMLAH BEBAN		28.416.942.337,00	25.887.261.895,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-24.089.450.565,00	-21.389.581.439,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	207.072.527,00	1.706.298,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	0,00	36.507.156,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	32.575.786,00	20.232.564,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	4.613.256,00	39.826.651,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		235.035.057,00	-54.394.945,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-23.854.415.508,00	-21.443.976.384,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN MAKASSAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
EKUITAS AWAL	E.1.	127.781.831.286,00	130.240.838.811,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-23.854.415.508,00	-21.443.976.384,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	20.225.008.213,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1.	22.382.997.435,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	-2.157.989.222,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	22.498.918.730,00	18.984.968.859,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	146.651.342.721,00	127.781.831.286,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Karantina Pertanian Makassar

Visi dan Misi

Visi

”Menjadi karantina yang handal dan akuntabel dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati guna pencapaian swasembada pangan dan mendorong akselerasi ekspor serta ketahanan dan keamanan pangan di Sulawesi Selatan”

Misi

Adapun Misi dari Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola sistem perkarantinaan dalam melindungi sumber daya hayati hewan/tumbuhan dari ancaman HPHK/OPTK dan pangan segar dari cemaran nuklir, biologi, dan kimia.
2. Meningkatkan daya saing komoditas hewan dan tumbuhan dalam perdagangan domestik dan internasional.
3. Mendorong terwujudnya peran karantina dalam akselerasi ekspor kakao dan komoditas unggulan pertanian lainnya di Sulawesi Selatan yang akseptabel dan mampu bersaing di pasar internasional.
4. Mewujudkan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan dengan mengimplementasikan secara konsisten ISO 9001:2008/SNI 19-9001-2008.
5. Meningkatkan kompetensi sebagai Laboratorium Pengujian (*Testing Laboratory*) mengimplementasikan secara konsisten SNI 17025:2008.
6. Meningkatkan kepatuhan dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana, teknologi yang aplikatif dengan sistem komputerisasi.

Sejarah Badan Karantina Pertanian

Terminologi “karantina” berasal dari bahasa Latin “QUARANTA” yang berarti empat puluh. Istilah tersebut lahir sekitar abad XIV, ketika penguasa di Venezia menetapkan batas waktu yang diberlakukan untuk menolak masuk dan merapatnya kapal yang datang dari negara lain, untuk menghindari terjangkitnya penyakit menular. Awak kapal dan penumpangnya diharuskan untuk tinggal dan terisolasi di dalam kapal selama 40 hari, untuk mendeteksi kemungkinan terbawanya penyakit.

Sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa hama atau penyakit pada makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, dapat menular dari satu wilayah ke wilayah Negara lain melalui lalu lintas manusia atau benda-benda yang menjadi media pembawa. Untuk hama dan penyakit hewan, penularannya dapat terjadi melalui lalu-lintas hewan dan produk-produknya, organisme pengganggu tumbuhan dapat menyebar melalui tanaman hidup dan bagian tanaman.

Sejarah Karantina Pertanian di Indonesia telah diawali sejak jaman penjajahan Hindia Belanda, hal ini diawali dengan adanya penyebaran penyakit karat daun kopi yang

disebabkan oleh *Hemileia vastatrix* di Srilangka. Pemerintah kolonial menyadari bahwa pada saat itu perkebunan kopi di Indonesia merupakan sumber utama pendapatan. Menyadari akan ancaman penyakit tersebut maka pemerintah berusaha keras mencegah penyebaran penyakit tersebut ke Indonesia. Sebagaimana diketahui Areal perkebunan kopi berkembang luas, khususnya di Jawa, sejak Gubernur Jenderal Van den Bosch memperkenalkan Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) pada tahun 1832. Bertitik tolak dari kecemasan Hindia Belanda terhadap penyakit kopi, lahirlah Ordonansi 19 Desember 1877 (Staatsblad No.262) yang melarang pemasukan tanaman kopi dan biji kopi dari Srilanka. Ordonansi tersebut merupakan pertama kali yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda dalam bidang perkarantinaan tumbuhan di Indonesia.

Beberapa waktu setelah terbitnya Ordonansi pertama, terbit Ordonansi baru yaitu Ordonansi 28 Januari 1914 (Staatsblad No.161) yang mengatur tentang pengawasan terhadap pemasukan buah-buahan segar dari Australia yang dilakukan oleh seorang ahli. Penyelenggaraan kegiatan perkarantinaan secara institusional di Indonesia secara nyata baru dimulai oleh sebuah organisasi pemerintah bernama *Instituut voor Plantenziekten en Cultures* (Balai Penyelidikan Penyakit Tanaman dan Budidaya) Pada saat yang bersamaan dapat diketahui bahwa di daerah bagian barat Ausatralia sedang terjangkit hama lalat buah (*Mediterranean Fruitfly*) atau dikenal dengan nama latin *Ceratitis capitata*. Dari ordonansi inilah dibentuk organisasi penyelenggaraan kegiatan perkarantinaan secara konstitusi bernama *Instituut voor Platenziekten en Cultures* (Balai Penyelidikan Penyakit Tanaman dan Budidaya).

Pada tahun 1930 pelaksanaan kegiatan operasional karantina di pelabuhan-pelabuhan diawasi secara sentral oleh Direktur Balai Penyelidikan Penyakit Tanaman dan Budidaya, serta ditetapkan seorang pegawai Balai yang kemudian diberi pangkat sebagai *Plantenziektenkundigeambtenaar* (pegawai ahli penyakit tanaman)

Akan tetapi sejak tahun 1939 organisasi karantina yang melaksanakan operasional karantina tumbuhan mengalami perkembangan dan perubahan. Pada tahun tersebut telah ditetapkan Dinas Karantina Tumbuh-tumbuhan (*Plantequarantine Dienst*) yang menjadi salah satu Seksi dari Balai Penyelidikan Hama dan Penyakit Tanaman (*Instituut voor Plantenziekten*). Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian tahun 1957 Dinas Karantina Tumbuh-tumbuhan ditingkatkan statusnya dari status Seksi menjadi status Bagian.

Pada tahun 1957 dengan Keputusan Menteri Pertanian, dinas tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Bagian.

Tahun 1966 dalam reorganisasi dinas karantina tumbuhan tidak lagi ditampung dalam organisasi Lembaga Pusat Penelitian Pertanian (LP3) yang merupakan penjelmaan LPHT. Kemudian Karantina menjadi salah satu Bagian di dalam Biro Hubungan Luar Negeri Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian.

Pada tahun 1969, status organisasi karantina tumbuhan diubah kembali dengan ditetapkannya Direktorat Karantina Tumbuh-tumbuhan yang secara operasional berada dibawah Menteri Pertanian dan secara administratif dibawah Sekretariat Jenderal. Dengan status Direktorat tersebut, status organisasi karantina tumbuhan meningkat dari eselon III menjadi eselon II.

Pada tahun 1974 organisasi karantina diintegrasikan dalam suatu wadah Pusat Karantina Pertanian di bawah pengawasan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Seiring dengan perkembangan era Orde Baru, organisasi Direktorat Karantina Tumbuhan diubah menjadi Pusat Karantina Pertanian dengan dibentuk cabang Karantina Tumbuhan di seluruh Indonesia dengan status non struktural.

Tahun 1980 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.453/Kpts/Um/Org/6/1980 tahun 1980 dan 861/Kpts/OT-210/12/1980 tanggal 21 Desember 1980, organisasi Pusat Karantina Pertanian (yang notabene baru diisi karantina tumbuhan ex Direktorat Karantina Tumbuhan), mempunyai rentang kendali manajemen yang luas. Pusat Karantina Pertanian pada masa

itu terdiri dari 5 Balai (eselon III), 14 Stasiun (eselon IV), 38 Pos (eselon V) dan 105 Wilayah Kerja (non structural) yang tersebar diseluruh Indonesia.

Pada tahun 1983 unsur Pusat Karantina Pertanian yang terdiri atas karantina tumbuhan dan hewan diintegrasikan. Selain itu status sebelumnya di bawah pengawasan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dialihkan kembali ke Sekretaris Jenderal dengan pembinaan operasional secara langsung di bawah Menteri Pertanian. Sementara Karantina Ikan yang masih embrio terus berproses menjadi Bidang Karantina Ikan pada Kantor Pusat Karantina Pertanian.

Pada tahun 1985 Direktorat Jenderal Peternakan menyerahkan pembinaan unit karantina hewan, sedangkan Badan Litbang Pertanian menyerahkan pembinaan unit karantina tumbuhan, masing-masing kepada Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian. Di bidang peraturan perundangan tanggal 8 Juni 1992 adalah yang monumental dan hari yang tidak terlupakan, karena Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang No.16 tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Perkembangan di bidang legislasi terus berlanjut dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan dan kemudian lahir PP No. 14 tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Karantina Pertanian Makassar. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Karantina Pertanian Makassar menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar

Karantina Pertanian Makassar dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Karantina Pertanian Makassar yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya

telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan

piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar Karantina Pertanian Makassar telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	207.603.000,00	207.603.000,00
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	3.449.680.000,00	3.449.680.000,00
Pendapatan Jasa Lainnya	134.120.000,00	134.120.000,00
Jumlah Pendapatan	3.791.403.000,00	3.791.403.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	11.155.808.000,00	10.194.015.000,00
Belanja Lembur	1.100.000.000,00	2.313.743.000,00
Belanja Barang Operasional	3.302.938.000,00	3.812.982.000,00
Belanja Barang Non Operasional	1.030.422.000,00	654.910.000,00
Belanja Barang Persediaan	1.240.396.000,00	1.005.185.000,00
Belanja Jasa	3.043.100.000,00	2.053.518.000,00
Belanja Pemeliharaan	2.442.032.000,00	2.488.932.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.180.460.000,00	1.937.010.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.858.764.000,00	3.198.164.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.204.080.000,00	458.736.000,00
Jumlah Belanja	34.558.000.000,00	28.117.195.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.551.725.167,00 atau mencapai 120,05% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3.791.403.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	207.603.000,00	208.464.947,00	100,42
Pendapatan Denda	0,00	690.050,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	134.120.000,00	160.920.000,00	119,98
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	3.449.680.000,00	4.164.494.304,00	120,72
Pendapatan Lain-lain	0,00	17.155.866,00	0,00
Jumlah	3.791.403.000,00	4.551.725.167,00	120,05

Realisasi Pendapatan TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,15% dibandingkan TA 2019. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Besar Karantina Pertanian Makassar adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	208.464.947,00	3.098.718,00	6.627,46
Pendapatan Denda	690.050,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	160.920.000,00	399.500.000,00	-59,72
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	4.164.494.304,00	4.096.796.534,00	1,65
Pendapatan Lain-lain	17.155.866,00	740.086,00	2.218,09
Jumlah	4.551.725.167,00	4.500.135.338,00	1,15

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp26.948.362.897,00 atau 95,84% dari anggaran belanja sebesar Rp28.117.195.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2020

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	12.507.758.000,00	12.059.723.213,00	96,42
Belanja Barang	11.952.537.000,00	11.277.517.055,00	94,35
Belanja Modal	3.656.900.000,00	3.613.244.650,00	98,81
Total Belanja Kotor	28.117.195.000,00	26.950.484.918,00	95,85
Pengembalian Belanja		-2.122.021,00	0.00
Total Belanja	28.117.195.000,00	26.948.362.897,00	95,84

Dibandingkan dengan Tahun 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 18,40% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. karena adanya Tambahan belanja Khususnya belanja Modal

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	.%
Belanja Pegawai	12.057.601.192,00	12.441.964.543,00	-3,09
Belanja Barang	11.277.517.055,00	9.546.175.973,00	18,14
Belanja Modal	3.613.244.650,00	771.689.450,00	368,23
Total Belanja	26.948.362.897,00	22.759.829.966,00	18,40

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp12.057.601.192,00 dan Rp12.441.964.543,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar -3,09% dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. disebabkan karena Realisasi Belanja Lembur dari UPT lain Muncul setelah batas Pagu Pencairan

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	10.100.744.213,00	10.487.833.347,00	-3,69
Belanja Lembur	1.958.979.000,00	1.958.246.000,00	0,04
Jumlah Belanja Kotor	12.059.723.213,00	12.446.079.347,00	-3,10
Pengembalian Belanja Pegawai	-2.122.021,00	-4.114.804,00	-48,43
Jumlah Belanja	12.057.601.192,00	12.441.964.543,00	-3,09

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp11.277.517.055,00 dan Rp9.546.175.973,00. Realisasi belanja barang TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 18,14% dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. karena disesuaikan dengan Kegiatan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	3.801.526.203,00	2.682.773.700,00	41,70
Belanja Barang Non Operasional	639.977.600,00	598.284.350,00	6,97
Belanja Barang Persediaan	1.003.693.680,00	714.300.674,00	40,51
Belanja Jasa	1.787.802.324,00	1.530.337.056,00	16,82
Belanja Pemeliharaan	2.140.739.060,00	1.861.887.704,00	14,98
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.903.778.188,00	2.160.667.489,00	-11,89
Jumlah Belanja Kotor	11.277.517.055,00	9.548.250.973,00	18,11
Pengembalian Belanja Barang	0,00	-2.075.000,00	-100,00
Jumlah Belanja	11.277.517.055,00	9.546.175.973,00	18,14

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.613.244.650,00 dan Rp771.689.450,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 368,23% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya Penambahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.155.558.900,00	763.148.000,00	313,49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	457.685.750,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	8.541.450,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	3.613.244.650,00	771.689.450,00	368,23
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	3.613.244.650,00	771.689.450,00	368,23

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.155.558.900,00 dan Rp763.148.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 313,49% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Pendanaan Kendaraan Roda 4 dan Pengadaan Kendaraan Roda 2

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.155.558.900,00	763.148.000,00	313,49
Jumlah Belanja Kotor	3.155.558.900,00	763.148.000,00	313,49
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	3.155.558.900,00	763.148.000,00	313,49

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp457.685.750,00 dan Rp0,00.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Adanya Penambahan Gedung Laboratorium dan Gedung wilker BAndara Hasanuddin

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	457.685.750,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	457.685.750,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	457.685.750,00	0,00	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.913.686,00 dan Rp4.793.999,00.

Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2020
Sewa Pelabuhan Paotere	4913.686,00
Penjelasan 2	0,00
dst..	0,00
Jumlah	0,00

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp5.002,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,00	5.002,00
Jumlah	0,00	5.002,00

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-25,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

C.1.4. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.119.566.772,00 dan Rp699.151.402,00. Persediaan

merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Barang Konsumsi	1.119.566.772,00	699.151.402,00
Jumlah	1.119.566.772,00	699.151.402,00

Rincian Persediaan Desember 2020 Terdiri dari

1010301001	Alat Tulis	855.000,
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	3.731.000,
1010301003	Penjepit Kertas	610.000,
1010301006	Ordner Dan Map	25.778.750,
1010301010	Alat Perekat	12.043.000,
1010301012	Staples	1.029.540,
1010301013	Isi Staples	(69.540,)
1010301014	Barang Cetakan	102.825.850,
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	6.187.000,
1010302001	Kertas HVS	14.584.000,
1010302002	Berbagai Kertas	29.700.000,
1010302004	Amplop	2.780.000,
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	784.000,
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	41.981.674,
1010304001	Continuous Form	35.437.910,
1010304003	Pita Printer	1.175.000,
1010304004	Tinta/Toner Printer	44.000,
1010304006	USB/Flash Disk	5.000.000,
1010304011	CD/DVD	91.000,
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	834.998.588,
Jumlah Barang Konsumsi		1.119.566.772,

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Besar Karantina Pertanian Makassar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp85.670.372.000,00 dan Rp85.670.372.000,00.

URAIAN	INTRAKOMPTABEL
A . Saldo Awal	85,670,372,000
B. Mutasi Tambah	0
C. Mutasi Kurang	0
D. Saldo Akhir	85,670,372,000

Rincian Tanah yang ada di Balai Besar Karantina Pertanian Makassar dan telah memiliki dokumen sertifikat adalah

No	Uraian	Luas M2	NUP	Rupiah
1	Wilker karuwisi	1,287	1	5,908,361,000
2	Wilker Laboratorium Daya	3,961	2	11,467,590,000
3	Wilker Bandara Hasanuddin	417	4	1,728,006,000
4	Wilker Bone Bajoe	322	5	328,595,000
5	Wilker Tuju tuju	297	9	120,173,000
6	Wilker Jeneponto	274	10	75,539,000
7	Wilker Bandara Hasanuddin	1000	11	3,659,400,000
8	Wilker Sinjai	837	12	466,287,000
9	Wilker Bulukumba	506	13	199,313,000
10	Wilker maros Pattene	6000	14	2,178,918,000
11	Wilker maros Pattene	4000	15	1,468,320,000
12	Wilker Pelabuhan Laut	91	16	1,974,498,000
13	Wilker Bone Bajoe	5000	17	4,523,005,000
14	Wilker Kantor Induk BBKP Makassar	849	18	5,894,780,000
15	Wilker Kantor Induk BBKP Makassar	2200	19	14,643,834,000
16	Wilker Kantor Induk BBKP Makassar	4,710	20	30,128,033,000
17	Wilker Jeneponto	848	1	231,590,000
18	Wilker Maros Tanah untuk jalan	1,798	1	674,130,000
				85,670,372,000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Karantina Pertanian Makassar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp35.440.393.776,00 dan Rp32.301.880.876,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	32.301.880.876,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	3.154.118.900,00
Transfer Masuk	39.244.000,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	64.870.000,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-119.720.000,00

Saldo per 31 Desember 2020	35.440.393.776,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-30.113.362.981,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	5.327.030.795,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

Mutasi tambah atas nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp3.258.232.900 (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah), berasal dari:

1. Pengadaan Minibus (penumpang 14 orang kebawah) 3 unit/ Rp.1.075.000.000,-
2. Pengadaan Sepeda Motor 12 Unit/Rp.314.400.000,-
3. Pengadaan Lemari besi 2 Buah/Rp.6.600.000
4. Pengadaan Meja Kerja kayu 1 Buah/Rp.11.000.000,-
5. Pengadaan Kursi Besi.142 Buah/Rp.200.141.400,-
6. Pengadaan Sice 3 Buah/Rp.14.323.100,-
7. Pengadaan Meja Resepsionis 1 Buah/Rp.7.750.000
8. Pengadaan Kasur/Spring bed 6 buah/Rp.59.930.000,-
9. Pengadaan A.C Window 2 Buah Rp. 75.762.500,-
10. Pengadaan A.C Split 5 Buah Rp. 33.841.500,-
11. Pengadaan Video Conference1 Buah Rp.99.800.000
12. Pengadaan Handphone 3 Buah Rp. 25.965.000,-
13. Pengadaan Micropipette 50-200 UI 3 Buah Rp.15.903.000,-
14. Pengadaan Pipette Washer 1 buah Rp. 2.083.000,-
15. Pengadaan Stereo Microscope 1 buah/Rp.50.076.000,-
16. Pengadaan Centrifuge Hematocrit 1 Buah/Rp.64.224.000,-
17. Pengadaan Automotic Slide Staining machine 5 Buah Rp. 97.852.400,-
18. Pengadaan Mikroskop Binokuler 3 Buah Rp. 152.874.000,-
19. Pengadaan PC based UV Documentation System 1 Buah Rp. 218.280.000,-
20. Pengadaan Analytical Balance 1 Buah Rp. 25.225.000,-
21. Pengadaan Vortex Mixer 2 Buah Rp. 8.056.000,-
22. Pengadaan Laboratory Blender Warning 1 Buah Rp. 62.193.000,-
23. Pengadaan Targe Drone 1 Buah 23.869.000,-
24. Pengadaan P.C Unit 14 Buah Rp. 136.100.000,-
25. Pengadaan Lap top 15 Buah Rp. 222.600.000,-
26. Pengadaan Printer 17 Buah Rp. 64.800.000,-
27. Pengadaan Server 1 Buah Rp. 85.800.000,-

Mutasi tambah Transfer masuk atas nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp.39.244.000 (Tiga Puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu Rupiah), berasal dari:

1. Lap top 2 Buah Berasal dari Balai Besar Tanjung Priok Rp. 39.244.000,-

Mutasi kurang atas nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp119.720.000 (Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), berasal dari:

1. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya kendaraan Dinas Roda Empat senilai (Rp.119.720.000)

Rincian data Peralatan dan Mesin berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas (m2/unit)	Nilai (Rp)
Baik	2.344	35.367.072.105
Rusak Ringan	20	4.939.000
Rusak Berat	18	99.229.500

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Karantina Pertanian Makassar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp59.271.476.933,00 dan Rp36.103.146.933,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	36.103.146.933,00
Mutasi Tambah	
Pengembangan Nilai Aset	278.950.000,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	55.280.550,00
Koreksi Kesalahan input IP	22.900.740.000,00
Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi	158.623.000,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	-51.713.435,00
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	-173.550.115,00
Saldo per 31 Desember 2020	59.271.476.933,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-7.937.893.014,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	51.333.583.919,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Pekerjaan Bangunan laboratorium senilai Rp. 28.102.399.780
2. Bangunan Gedung senilai Rp16.058.135.780 Wilker Bandara
3. Mutasi kurang atas nilai Bangunan Gedung senilai Rp.4.710.090.780

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Karantina Pertanian Makassar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.610.713.951,00 dan Rp7.010.186.951,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	7.010.186.951,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Kesalahan input IP	-399.473.000,00
Saldo per 31 Desember 2020	6.610.713.951,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-3.581.097.824,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	3.029.616.127,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah berupa:

4. Mutasi Tambah atas nilai Tugu Titik Kontrol/Pasti senilai Rp. 12.044.264.000
5. Mutasi kurang atas nilai Tugu Titik Kontrol/pasti senilai Rp.223.979.000
6. Revaluasi BMN Tahun 2020 nilai bangunan Air senilai Rp. 1.007.000,-
7. Mutasi kurang atas nilai Bangunan Air senilai Rp49.381.000
8. Mutasi kurang atas nilai Jalan Dan Jembatan senilai Rp351.099.000

C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Balai Besar Karantina Pertanian Makassar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp180.175.750,00 dan Rp0,00. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	0	0	0
B. Mutasi Tambah	180.175.750	0	180.175.750
Perolehan/Penambahan KDP	7.318.000	0	7.318.000
Pengembangan KDP	172.857.750	0	172.857.750
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	180.175.750	0	180.175.750

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah Pembangunan Laboratorium di Jln Kapasa Raya Makassar, dan dilanjutkan di Tahun Anggaran 2021

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Karantina Pertanian Makassar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-41.632.353.819,00 dan Rp-34.019.153.791,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	35.440.393.776,00	-30.113.362.981,00	5.327.030.795,00
2.	Gedung dan Bangunan	59.271.476.933,00	-7.937.893.014,00	51.333.583.919,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.610.713.951,00	-3.581.097.824,00	3.029.616.127,00
Akumulasi Penyusutan		101.322.584.660,00	-41.632.353.819,00	59.690.230.841,00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp53.000.000,00 dan Rp53.000.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	53.000.000,00
Jumlah	53.000.000,00

C.3.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Besar Karantina Pertanian Makassar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp791.519.841,00 dan Rp1.446.349.841,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Besar Karantina Pertanian Makassar serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	1.446.349.841,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	119.720.000,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-64.870.000,00
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	-709.680.000,00

Saldo per 31 Desember 2020	791.519.841,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-758.774.841,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	32.745.000,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Besar Karantina Pertanian Makassar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-776.774.841,00 dan Rp-1.431.604.841,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	53.000.000,00	-18.000.000,00	35.000.000,00
2.	Aset Lain-lain	791.519.841,00	-758.774.841,00	32.745.000,00
Akumulasi Penyusutan		844.519.841,00	-776.774.841,00	67.745.000,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp81.661.328,00 dan Rp56.297.061,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Besar Karantina Pertanian Makassar per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	40.223.000,00	0,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	41.438.328,00	56.297.061,00
Jumlah	81.661.328,00	56.297.061,00

Belanja Pegawai Yang belum dibayar Berupa Uang Makan sebesar RP 40.223.000, dari tanggal 15 Desember s/d 31 Desember 2020.

Belanja Barang yang masih harus dibayar berupa Tagihan Listrik Tagihan Internet sebesar RP.41.438.328,

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp146.651.342.721,00 dan Rp127.781.831.286,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.327.491.772,00 dan Rp4.497.680.456,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	690.050,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	4.164.489.302,00	4.096.788.036,00	1,65
Pendapatan Jasa Lainnya	160.920.000,00	399.500.000,00	-59,72
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.392.420,00	1.392.420,00	0,00
Jumlah	4.327.491.772,00	4.497.680.456,00	-3,78

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp12.097.824.192,00 dan Rp12.441.964.543,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	6.856.695.720,00	7.110.343.120,00	-3,57
Beban Pembulatan Gaji PNS	99.798,00	108.178,00	-7,75
Beban Tunj. Anak PNS	157.567.132,00	159.932.392,00	-1,48
Beban Tunj. Beras PNS	353.771.700,00	368.647.680,00	-4,04
Beban Tunj. Fungsional PNS	810.490.000,00	816.160.000,00	-0,69
Beban Tunj. PPh PNS	19.569.612,00	23.433.801,00	-16,49

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Struktural PNS	145.325.000,00	146.145.000,00	-0,56
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	510.519.430,00	538.561.272,00	-5,21
Beban Tunjangan Umum PNS	99.344.900,00	114.875.000,00	-13,52
Beban Uang Lembur	1.958.979.000,00	1.958.246.000,00	0,04
Beban Uang Makan PNS	1.185.461.900,00	1.205.512.100,00	-1,66
Jumlah	12.097.824.192,00	12.441.964.543,00	-2,77

Untuk Uang Makan PNS di bulan Desember 2020 dibayarkan dari tanggal 1 s/d 14 Desember 2020 sehingga untuk pembayaran uang makan dari tanggal 14 s/d 31 Desember 2020 direalisasikan pada tahun 2021.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp662.027.474,00 dan Rp764.050.631,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	662.027.474,00	764.050.631,00	-13,35
Jumlah	662.027.474,00	764.050.631,00	-13,35

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.219.241.394,00 dan Rp4.817.237.885,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Bahan	523.382.000,00	590.184.350,00	-11,32
Beban Barang Non Operasional -	110.595.600,00	0,00	0,00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Penanganan Pandemi COVID-19			
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	169.050.000,00	0,00	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	233.280.000,00	220.560.000,00	5,77
Beban Honor Output Kegiatan	6.000.000,00	8.100.000,00	-25,93
Beban Jasa Lainnya	144.323.800,00	304.945.454,00	-52,67
Beban Jasa Profesi	138.400.000,00	85.400.000,00	62,06
Beban Keperluan Perkantoran	2.912.328.300,00	2.033.276.300,00	43,23
Beban Langganan Air	3.441.090,00	10.821.641,00	-68,20
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	783.258.604,00	509.441.934,00	53,75
Beban Langganan Listrik	607.173.524,00	575.150.745,00	5,57
Beban Langganan Telepon	26.853.385,00	34.702.906,00	-22,62
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	476.520.000,00	416.955.000,00	14,29
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10.347.903,00	11.982.400,00	-13,64
Beban Sewa	74.287.188,00	15.717.155,00	372,65
Jumlah	6.219.241.394,00	4.817.237.885,00	29,10

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.140.739.060,00 dan Rp1.861.887.704,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	770.180.000,00	499.509.000,00	54,19
Beban Pemeliharaan Jaringan	199.999.400,00	156.529.000,00	27,77
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.070.564.660,00	1.125.852.304,00	-4,91
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.995.000,00	79.997.400,00	25,00
Jumlah	2.140.739.060,00	1.861.887.704,00	14,98

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.903.778.188,00 dan Rp2.158.592.489,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	744.635.370,00	933.375.647,00	-20,22
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	231.000.000,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	132.650.000,00	212.530.000,00	-37,59
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	160.851.760,00	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	437.916.030,00	733.294.328,00	-40,28
Beban Perjalanan Tetap	357.576.788,00	118.540.754,00	201,65
Jumlah	1.903.778.188,00	2.158.592.489,00	-11,80

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-4.913.687,00 dan Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan Diserahkan Kepada Masyarakat	-4.913.687,00	0,00	0,00
Jumlah	-4.913.687,00	0,00	0,00

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.398.245.741,00 dan Rp3.843.528.686,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Software	0,00	2.625.000,00	-100,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.290.579.429,00	965.878.610,00	137,15
Beban Penyusutan Irigasi	30.407.951,00	31.798.790,00	-4,37
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	687.241.885,00	117.881.787,00	482,99
Beban Penyusutan Jaringan	122.787.299,00	122.605.400,00	0,15
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0,00	4.322.365,00	-100,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.267.229.177,00	2.598.416.734,00	-12,75
Jumlah	5.398.245.741,00	3.843.528.686,00	40,45

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-0,00 dan Rp-25,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang PNBK	0,00	-25,00	-25,86

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Jumlah	-0,00	-25,00	-41,86

D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	-36.507.156,00	-100,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-4.613.256,00	-3.762.457,00	22,61
Beban Persediaan Rusak/Usang	0,00	-36.064.194,00	-100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	15.419.920,00	19.492.478,00	-20,89
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	207.072.527,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	1.706.298,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	16.625.866,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	530.000,00	740.086,00	-28,39
Jumlah	235.035.057,00	-54.394.945,00	-532,09

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp127.781.831.286,00 dan Rp130.240.838.811,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp-23.854.415.508,00 dan Rp-21.443.976.384,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp20.225.008.213,00 dan Rp0,00.

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp22.382.997.435,00 dan Rp0,00. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2020.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Gedung dan Bangunan	22.730.757.000,00
Jalan dan Jembatan	-351.099.000,00
Irigasi	-48.374.000,00
Jumlah	22.382.997.435,00

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-2.157.989.222,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2020.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-3.231.496.729,00
Akumulasi Penyusutan Irigasi	3.477.100,00
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	911.407.407,00
Gedung dan Bangunan	158.623.000,00
Jumlah	-2.157.989.222,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp22.498.918.730,00 dan Rp18.984.968.859,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2020.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Ditagihkan ke Entitas Lain	26.948.362.897,00
Diterima dari Entitas Lain	-4.551.725.167,00
Transfer Masuk	102.281.000,00
Jumlah	22.498.918.730,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2020 saldo DDEL adalah sebesar Rp-4.551.725.167,00 sedangkan DKEL sebesar Rp26.948.362.897,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp102.281.000,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2020.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	018120100412126000KD	39.244.000,00
2.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	018120100412126000KD	-4.905.500,00
3.	Barang Konsumsi	018120199412110000KP	67.942.500,00
Jumlah			102.281.000,00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp146.651.342.721,00 dan Rp127.781.831.286,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Struktur Organisasi Balai Besar Karantina Pertanian Makassar adalah sebagai berikut :

Kepala Balai/ Kuasa Pengguna Anggaran	: Andi PM Yusmanto AM,SP,MH
Kabag Umum	: Ir. Muhammad Sahrir
Kabid KH	: Drh. Sri Utami, M.Sc
Kabid KT	: Nuni Ujjani Natsir, SP.,MM
Kuasa Pengguna Anggaran	: Andi PM Yusmanto AM,SP,MH
Pejabat Pembuat Komitmen	: Musdar, SP,
Pejabat Penandatangan SPM	: Haslinda Saleh, SE, MM
Bendahara Pengeluaran	: R. Sekar Kencana Windapura, SE
Bendahara Penerimaan	: Ayu Suci Rastiani, Amd.Kom

DIPA-018.12.2.238052/2020 tanggal 12 – 11 -2019

DIPA-018.12.2.238052/2020 Revisi ke 01 tanggal 24 –04- 2020

DIPA-018.12.2.238052/2020 Revisi ke 02 tanggal 19 –06- 2020

DIPA-018.12.2.238052/2020 Revisi ke 03 tanggal 04 –08- 2020

DIPA-018.12.2.238052/2020 Revisi ke 04 tanggal 01–09- 2020

DIPA-018.12.2.238052/2020 Revisi ke 05 tanggal 27 –10- 2020

DIPA-018.12.2.238052/2020 Revisi ke 06 tanggal 17 –12- 2020